**EXECUTIVE SUMMARY**

**HASIL EVALUASI TAHUN PERTAMA**

**RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018-2023**

Berdasarkan hasil analisis evaluasi RPJMD Tahun Pertama Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 menggambarkan tentang pelaksanaan program pencapaian 5 (lima) Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam RPJMD, Renja dan RKPD di SKPD Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 menjadikan hal tersebut sebagai dasar pelaksanaan kinerja pembangunan pemerintah daerah. Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan RPJMD terutama yang terkait dengan pelaksanaan program prioritas dalam hal pencapaian Misi pemerintah Provinsi. Adapun penilaian capaian kinerja berdasarkan program prioritas yang mendukung pencapaian Misi 1-5 dari total 70 program sebagai berikut :

***Misi 1*** : Pada Misi 1 yang terdiri 2 tujuan, 6 sasaran dan 23 program prioritas terdapat 2 tujuan yang pencapaiannnya sangat tinggi yaitu terkait nilai IPM dan penurunan tingkat kemiskinan. Berdasarkan nilai IPM yang dicapai yaitu 76,61, merupakan nilai IPM yang tertinggi ke-3 secara nasional setelah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta (Berdasarkan BPS Tahun 2019), sedangkan secara regional pencapaian nilai IPM ini merupakan yang tertinggi se-Kalimantan. Hal ini menandakan pencapaian tujuan 1 dari Visi Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Sedangkan tujuan 2, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, yaitu 5,94 %. Hal ini mendukung pencapaian Visi Misi Pemerintah Provonsi Kalimantan Timur yaitu Berdaulatnya Sumber Daya Manusia Kalimantan Timur. Nilai penurunan tersebut juga mendukung penurunan tingkat kemiskinan secara nasional.

Terdapat 5 sasaran yang memiliki capaian kinerja yang sangat tinggi atau target pencapaian sudah memenuhi, sedangkan terdapat satu sasaran yaitu meningkatnya daya saing tenaga kerja yang sedang. Secara keseluruhan sasaran pada misi 1 sudah memenuhi pencapaian secara keseluruhan.

Berdasarkan program prioritas pada Misi 1 yang terdiri dari 23 program terdapat 13 program yang berhasil mencapai target **sangat tinggi** terhadap indikator program yang ditetapkan yaitu(1) Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas ;(2) Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan ; (3) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan ; (4) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan ; (5) Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat; (6) Program Pendidikan Luar Biasa ; (7) Program Pendidikan Jarak Jauh (Distance Learning System);(8) Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak ; (9) Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan ; (10) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan ; (11) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan ; (12) Program Peningkatan Prestasi Olahraga ; (13) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja. Terdapat 2 program pencapaian **tinggi** terhadap target indikator yang ditetapkan yaitu (1) Program pendidikan politik masyarakat ; (2) Program Pengembangan Nilai Budaya ; masing-masing 1 program yang pencapaian target **sedang** (Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan) dan **rendah** (Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma). Ada 2 program yang pencapaiannnya **sangat rendah** terhadap target indiaktor yang sudah ditetapkan ((1) Program Peningkatan Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan ; (2) Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan). Namun, yang paling menjadi perhatian adalah terdapat 4 program prioritas pada misi 1 yang **tidak dilaksanakan** oleh perangkat daerah yaitu program pengembangan nilai-nilai keagamaan, program pengembangan sekolah kejuruan, program penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak, dan program peningkatan upaya kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda.

**Faktor pendorong dan penghambat** terhadap pencapaian pada misi 1 adalah :

| **Faktor** | |
| --- | --- |
| **Pendorong** | **Penghambat** |
| Faktor Pendorong secara Internal meliputi :   1. Komitmen alokasi anggaran/pembiayaan dari pemerintah provinsi untuk memprioritaskan program pembangunan strategis yang memiliki daya ungkit 2. Ketersediaan SDM di lingkup SKPD dan institusi pemerintah serta institusi mitra yang memenuhi kualifikasi kompetensi untuk mendukung pencapaian misi pembangunan 1; 3. Sudah terbangun mekanisme komunikasi - Koordinasi antar SKPD dan pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan program pembangunan yang telah direncanakan 4. Sudah terbangun struktur organisasi SKPD yang proporsional untuk mengimplementasikan program pembangunan yang direncanakan   Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:   1. Arah kebijakan nasional dan global yang memprioritaskan peningkatan kompetensi SDM dalam peta jalan pengembangannya 2. Teknologi informasi dan komputer yang berkembang semakin mudah diakses masyarakat guna mendukung akselerasi peningkatan kualitas SDM | Faktor Penghambat Pencapaian Sasaran 1:   * 1. Terdapat kegiatan yang berjalan tidak optimal karena waktu pelaksanaannya bertepatan dengan periode libur sekolah dan agenda kegiatan pendidikan formal (contoh :penerimaan siswa baru perguruan tinggi);   2. Belum dilakukan program pendidikan politik yang secara spesifik bertujuan menyasar kelompok pemilih pemula   3. Salah satu program yang mendukung pada sasaran 1 tidak dilaksanakan. Program dan kegiatan terkait pengembangan nilai – nilai keagamaan tidak terlaksana. Tidak terdapat data dan atau informasi yang menjelaskan penyebab terhambatnya pelaksanaan kegiatan dan program tersebut.   4. Konteks budaya local masih belum ditentukan secara spesifik |
| Faktor penghambat Sasaran 2 :   1. Program dan kegiatan untuk pengembangan sekolah kejuruan tidak terlaksana sehingga tidak bias dilakukan evaluasi. 2. Sekolah pelaksana program belum menerima pelimpahan wewenang secara formal (Surat keputusan penunjukan pelaksana program) untuk melaksanakan program tersebut. 3. Kegiatan/event tingkat nasional didasarkan pada penjadwalan yang dilakukan oleh Kemendikbud. 4. Diperlukan waktu untuk melakukan review APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dalam setiap pembayaran tahapan kegiatan. 5. Rendahnya ketersediaan tenaga guru pengganti selama guru yang bersangkutan mengikuti pelatihan peningkatan Kompetensi PTK. 6. Organisasi pelaksana program terlambat menerima pelimpahan kewenangan formal untuk melaksanakan program sehingga berakibat keterlambatan dalam melaksanakan program tersebut (Badan pengelola beasiswa baru menerima penunjukan pada bulan Juli 2019). 7. Program dan kegiatan terkait penyelenggaraan pendidikan jarak jauh tidak terlaksana. 8. Kegiatan/event tingkat nasional didasarkan pada penjadwalan yang dilakukan oleh Kemendikbud. 9. Komitmen penentu kebijakan belum bersifat komprehensif, masih bersifat parsial, sehingga pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur pada Kabupaten Kota Layak Anak belum sepenuhnya sinkron dengan kebutuhan. 10. Penyalahgunaan pemanfaatan ruang terbuka hijau/taman oleh sebagian warga untuk kegiatan yang tidak relevan sehingga tidak mendukung penanaman nilai dan proses tumbuh kembang anak. 11. Masih kasus perkawinan usia dini/anak yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan kemiskinan sehingga menghambat program perlindungan dan pemenuhan hak anak. 12. Akses (ketersediaan dan keterjangkauan) layanan perpustakaan masih terbatas karena berada di pusat kota dan jauh dari wilayah pedesaan. Di sisi lain, sarana dan prasarana teknologi informasi untuk menjangkau layanan perpustakaan dalam jaringan (online) bagi masyarakat di wilayah pedesaan juga belum tersedia secara memadai. |
| Faktor penghambat pencapaian sasaran 3:   1. Indikator yang belum secara khusus mengarah pada jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya. 2. Beberapa kegiatan bukan merupakan priorittas untuk mendukung pencapaian target program yang ingin dicapai. 3. Realisasi program bergantung pada data dan usulan yang disampaikan oleh Dinas Sosial. 4. Realisasi program menunggu Peraturan Gubernur terkait data sasaran masyarakat miskin dan kurang mampu yang menerima JKN. |
| Faktor penghambat pencapaian sasaran 4 :   * 1. Belum adanya pendampingan bagi pelaku usaha dalam fasilitasi akses pasar, pemupukan modal dan pengembangan kreatifitas untuk peningkatan daya saing usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh kelompok perempuan   2. Program dan kegiatan terkait penguatan kelembagaan perempuan dan anak tidak terlaksana.   3. Belum adanya *base data* masyarakat yang tergolong dalam kemiskinan yang menyebabkan realisasi program penanggulangan kemiskinan bidang kesejahteraan social dan pembinaan penyandang cacat dan trauma yang menyebabkan pencapaian program tidak sesuai dengan target yang diprogramkan |
| Faktor penghambat pencapaian sasaran 5:   * 1. Gagalnya keterlibatan Kaltim dalam event dan multi event yang direncanakan dilaksanakan pada tanggal 10-18 Oktober oleh karna pembatalan tuan rumah Papua.   2. Jadwal pelaksanaan mengikuti agenda kegiatan dari institusi pusat sehingga institusi daerah hanya bersifat menunggu   3. Proses penetapan standarisasi infrastruktur olahraga belum selesai.   4. Program dan kegiatan terkait peningkatan upaya kewirausahaan dan kecapakan hidup pemuda tidak terlaksana. |
| Faktor penghambat pencapaian sasaran 6 :   1. Pendekatan pendidikan vokasional belum menjadi prioritas program untuk meningkatkan kompetensi SDM yang akan memasuki pasar tenaga kerja 2. Keterbatasan perangkat lunak dalam mendukung pelatihan/pendidikan vokasi yang dilaksanakan untuk meningkatkan daya saing SDM yang akan memasuki pasar tenaga kerja ( contoh : desain kurikulum, modul belajar, sistem sertifikasi) 3. Keterbatasan perangkat (keras/ sarana dan prasarana) institusi penyelenggara pendidikan / pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja |

**Rekomendasi tindak lanjut terhadap pencapaian Misi 1** adalah

Terhadap capaian program dan persoalan yang telah dijabarkan pada bab selanjutnya, dapat diberikan rekomendasi tindak lanjut terhadap pelaksanaan misi 1 yakni:

***Pertama,***diperlukan pembahasan kembali mengenai indikator dari sasaran yang hendak dicapai. Temuan evaluasi menunjukkan bahwa indikator dari sasaran dinilai belum tepat yang justru berakibat pada kesalahan dalam menentukan program dan kegiatan.

***Kedua,***diperlukan pembahasan yang mendalam untuk menentukan program dan kegiatan agar program dan kegiatan tersebut dapat benar-benar memiliki daya ungkit terhadap ketercapaian sasaran, tujuan dan misi pembangunan.

***Ketiga,*** hindari orientasi “melaksanakan rutinitas” dalam menentukan program dan kegiatan. Sebaliknya, program dan kegiatan harus diorientasikan pada inovasi yang mengarah pada capaian akseleratif terhadap target pembangunan daerah.

***Keempat***, perlunya penguatan manajemen pengelolaan dan pemahaman perencanaan berbasis program bukan sekedar pengerjaan rutinitas untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi.

**Secara umum**, pada Misi 1 terdapat permasalahan yaitu belum adanya program yang memiliki daya ungkit untuk meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia, terutama pada kelompok pemuda dan perempuan usia produktif yang akan memasuki pasar tenaga kerja di Dunia Industri dan Dunia Usaha (DIDU). Di sisi lain, Kalimantan Timur tercatat memiliki prospek pembangunan yang terbuka luas pada sektor pertanian, manufaktur dan jasa (ekonomi kreatif, pariwisata dll) dengan dukungan potensi sumberdaya yang dimilikinya. Peluang transformasi dan akselerasi pembangunan juga dimiliki oleh Kalimantan Timur seiring dengan penetapan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke dalam wilayahnya. Permasalahan mendasar dari daya saing tenaga kerja tersebut adalah *vertical mismatch* (ketidaksesuaian pekerjaan dg tingkat pendidikan dan upah) dan *horizontal mismatch* (ketidaksesuaian kualifikasi pekerjaan dan latar pendidikan).

Berdasarkan poses evaluasi yang dilakukan, Kalimantan Timur belum memiliki basis data/informasi tentang: 1) kinerja lembaga pendidikan umum dan vokasi sebagai penyedia (*supplier*) Tenaga Kerja (TK); 2) kebutuhan jumlah dan spesifikasi kebutuhan Tenaga Kerja dari DIDU yang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur dan 3) pola keterhubungan dan kesesuaian (*Link and Match*) antara kedua faktor tersebut. Langkah strategis yang direkomendasikan untuk mengatasi persoalan daya saing tenaga kerja tersebut adalah 1) melakukan pemetaan menyeluruh untuk mendapatkan gambaran aktual dinamika permintaan – penawaran Tenaga Kerja; 2) menyusun peta jalan akselerasi kualitas layanan pendidikan umum dan vokasi yang berorientasi pada prinsip *link and match* antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan kompetensi tenaga kerja pada dunia industri/dunia usaha dan 3) membentuk gugus tugas yang bekerja secara kolaboratif antar pemangku kepentingan terkait untuk mengimplementasikan peta jalan pengembangan pendidikan yang berorientasi peningkatan daya saing SDM, mengingat persoalan peningkatan daya saing SDM adalah permasalahan yang bersifat multidimensional. Sedangkan program taktis yang direkomendasikan adalah program: 1) perluasan dan peningkatan layanan pelatihan vokasi yang berorientasi permintaan pasar tenaga kerja; 2) program pemagangan pada perusahaan/lembaga mitra dan 3) perluasan dan peningkatan layanan sertifikasi kompetensi tenaga kerja.

***Misi 2*** : Pada misi 2 meliputi tujuan 3 dan 4 yakni meningkatkan ekonomi kerakyatan, dan mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan, yang terdiri dari 11 sasaran dan 26 program. Pada tujuan 3 memiliki capaian yang sangat tinggi (100%) dan tujuan 4 dengan target dan indikator yang ditetapkan pada tahun 2018 memiliki capaian yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa indikator tujuan 3 dan 4 sudah memenuhi pencapaian. Hal ini terlihat pada data Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur yang secara nasional masih rendah (nasional 5,02 %), namun secara regional, laju pertumbuhan ini merupakan yang tinggi (setelah Provinsi Kalimantan Utara). Hal ini menandakan ekonomi di Kalimantan Timur bergerak secara dinamis ke arah peningkatan. Hal tersebut menunjang perwujudan kemandirian ekonomi Kalimantan Timur secara berkelanjutan sesuai dengan Visi Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada misi 2 yaitu Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.

Terdapat 11 sasaran pada misi 2 yaitu Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UMKM, meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan, meningkatnya kontribusi sektor parwisata terhadap perekonomian daerah, meningkatnya kontribusi sektor perindustrian terhadap perekonomian daerah, meningkatnya realisasi investasi, meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap perekonomian daerah, meningkatnya kontribusi sektor peternakan terhadap perekonomian daerah, meningkatnya kontribusi sektor perkebunan terhadap perekonomian daerah, meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah, meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah, dan meningkatnya pendanaan pembangunan daerah. Terdapat 6 sasaran yang memiliki capaian kinerja yang sangat tinggi atau target pencapaian sudah memenuhi, 2 sasaran yang memiliki nilai capaian yang tinggi serta 1 sasaran yang memiliki nilai ketercapaian yang sedang, serta 2 sasaran yang memiliki nilai capaian yang sangat rendah. Hal ini menunjukan sasaran yang direncanakan sudah memenuhi pencapaian secara keseluruhan.

Terdapat 26 program yang terbagi ke dalam 11 sasaran pada Misi 2. Berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan dari 26 program terdapat **12 program yang berhasil mencapai target sangat tinggi** terhadap indikator program yang ditetapkan yaitu (1) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan ; (2) Program Pembangunan Desa dan Kawasan ; (3) Program pengembangan destinasi pariwisata ; (4) Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi ; (5) Program Pengembangan Usaha Peternakan ; (6) Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan ; (7) Program pengembangan perikanan tangkap ; (8) Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan ; (9) Program Pengelolaan Ruang Laut ; (10) Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Udang Unggulan ; (11) Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan ; (12) Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial. **Terdapat 2 program pencapaian tinggi** terhadap target indikator yang ditetapkan yaitu (1) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan ; (2) Program Peningkatan Produksi Perkebunan. Terdapat **7 program yang pencapaian target sangat rendah** : (1) Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ; (2) Program Peningkatan dan Pengembangan Industri ; (3) Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan ; (4) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan ; (5) Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan ; (6) Program Pengelolaan DAS dan RHL ; (7) Program Perlindungan dan KSDAE, dan **1 program yang pencapaiannya tidak ada karena tidak ada data yang diinformasikan** yaitu Program Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah. Namun, yang paling menjadi perhatian adalah terdapat **4 program prioritas pada misi 2 yang tidak dilaksanakan** oleh perangkat daerah yaitu program penguatan kelembagaan dan pengembangan koperasi dan UMKM, program kampong iklim, program peningkatan mutu dan pemasaran hasil perkebunan dan program perencanaan dan pengembangan sumber pendapatan daerah.

**Faktor pendorong dan penghambat** terhadap pencapaian pada misi 2 adalah

| **Faktor** | |
| --- | --- |
| **Pendorong** | **Penghambat** |
| Faktor Pendorong secara Internal meliputi :   1. Disusunnya RPJMD Berdasarkan Program Prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim” Berani untuk Kaltim Berdaulat” sebagai acuan dana rah pembangunan daerah; 2. Adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memfasilitasi dan mendorong pelaku usaha kecil dan menengah serta koperasi ikut dalam pembangunan ekonomi daerah; 3. Alokasi anggaran/pembiayaan yang bersumber dari APBD untuk memprioritaskan program pembangunan strategis sesuai RPJMD yang memiliki daya ungkit; 4. Kesesuaian jadwal dan ketentuan penyusunan perencanaan semua program dapat berjalan sesuai waktunya; 5. Ketersediaan SDM di lingkup SKPD dan institusi pemerintah serta institusi mitra yang memenuhi kualifikasi kompetensi untuk mendukung pencapaian misi 2; 6. Manajemen pembangunan provinsi Kaltim dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi berdasarkan sistem informasi yang terintegrasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Tim Anggaran Pendapatan Daerah; 7. Sudah terbangun mekanisme komunikasi - Koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengimplementasikan program pembangunan yang telah direncanakan setiap periodik; 8. Pemerintah Provinsi menyusun rencana pengembangan industri daerah yang salah satunya mendorong usaha kecil dan menengah dalam mendukung ekonomi masyarakat sebagai bagian pembangunan ekonomi di Kaltim   Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:   1. Kesesuaian Arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan global yang bertujuan meningkatkan PDRB berdasarkan pemanfaatan potensi sumber daya alam berkelanjutan dan terbarukan 2. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan produksi dan potensi sumber daya alam yang melimpah sehingga memungkinkan menjadi bahan baku usaha kecil dan menengah 3. Kondusifitas daerah sebagai upaya mendatangkan iklim investasi yang besar di Kalimantan Timur 4. Trend usaha kecil dan menengah yang lagi bertumbuh di Kalimantan Timur 5. Keberadaan jalur transportasi yang lengkap di Kota-kota besar Kalimantan Timur 6. Potensi keadaan alam di Kalimantan Timur yang sangat bervariasi mulai dari keanekaragaman hayati, hutan, sungai, danau, bukit, pegunungan hingga pesisir laut yang bisa menjadi obyek pariwisata andalan daerah 7. Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan usaha kecil dan menengah | Faktor Penghambat Pencapaian Sasaran 7:   1. Program tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 |
| Faktor Pendorong secara Internal meliputi :   1. Orientasi Misi dan Visi Pemerintah Provinsi yang mengarah pembangunan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan ; 2. Adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memfasilitasi dan mendorong pemberdayaan masyarakat pedesaan di daerah; 3. Alokasi anggaran/pembiayaan yang bersumber dari APBD untuk memprioritaskan program pembangunan strategis sesuai RPJMD yaitu meningkatkan keberdayaan pedesaan; 4. Tersedianya SDM pendamping pedesaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat pedesaan; 5. Program penguatan kelembagaan di desa sebagai upaya mendukung kemandirian pemerintahan di desa   Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:   1. Kesesuaian Arah kebijakan pembangunan pedesaan secara nasional 2. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia yang mendapatkan program untuk penguatan daerah tertinggal, terluar dan terjauh (3T) dari pemerintah pusat 3. Kondusifitas daerah yang menyebabkan program pembangunan pedesaan bisa diterima oleh masyarakat 4. Keputusan penempatan lokasi Ibu kota negara yang baru dari pemerintah pusat merupakan salah satu pendorong kegiatan ekonomi di Kalimantan Timur berbasis sektor pedesaan 5. Keberadaan jalur laut dan pelabuhan ekspor di Kalimantan Timur mendorong pengembangan aktifitas produksi sumber daya alam 6. Peran masyarakat pedesaan di Kalimantan Timur yang kental nuansa budaya dan adat istiadat mendukung dalam proses pembangunan secara berkelanjutan dengan tidak meninggalkan kearifan lokal | Faktor penghambat Sasaran 8:   1. Program dan kegiatan untuk pengembangan lembaga ekonomi pedesaan masih belum ada penentuan kriteria lembaga ekonomi usaha desa, system pengelolaan hingga produksi dari lembaga ekonomi desa yang akan diberdayakan tersebut; 2. Belum ada spesifikasi dan regulasi lembaga ekonomi yang dikembangkan sehingga kemungkinan salah sasaran menjadi lebih besar; 3. Aktivitas produksi yang relatif kurang beragam dan cenderung monoton pada sektor pertanian; 4. Minimnya sarana dan prasarana system informasi sebagai pendukung lembaga ekonomi pedesaan 5. Program pembangunan desa dan kawasan masih terhambat terhadap aksesibilitas 6. Geografi pedesaan dan kawasan di Kalimantan Timur yang masih sangat luas 7. Masih rendahnya SDM aparatur desa yang memahami administrasi pemerintahan sehingga menyulitkan program pembinaan penyelengaraan pemerintahan desa 8. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terhambat di pelosok desa Kalimantan Timur 9. Program kampung iklim tidak dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 |
| Faktor Pendorong secara Internal meliputi :   1. Disusunnya Rencana Pengembangan Pariwisata Daerah yang menjadikan pembangunan pariwisata sudah terencana; 2. Adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memfasilitasi dan mendorong sektor pariwisata sebagai sektor unggulan agar mendukung pembangunan ekonomi masyarakat; 3. Sudah terbangun mekanisme system jaringan pengelolaan pariwisata antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Swasta dan masyarakat melalui kalender event pariwisata Kaltim; 4. Program perencanaan pengembangan pariwisata terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur sehingga konektivitas pariwisata bisa terbangun dengan baik   Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:   1. Kesesuaian Arah kebijakan pembangunan pariwisata nasional dengan kebijakan pariwisata provinsi 2. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki obyek dan destinasi wisata yang sangat banyak 3. Kondusifitas daerah sebagai upaya mendatangkan iklim wisatawan dalam negeri dan luar negeri yang besar di Kalimantan Timur 4. Ketersediaan Bandar Udara di Balikpapan dan Samarinda yang menjadi pintu gerbang masuknya wisatawan 5. Peran masyarakat pedesaan di Kalimantan Timur yang kental nuansa budaya dan adat istiadat membantu dalam proses pembangunan pariwisata secara berkelanjutan 6. Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan destinasi pariwisata di Kalimantan Timur | Faktor penghambat pencapaian sasaran 9:   1. SDM, sarana dan prasarana di bidang Pariwisata Kalimantan Timur yang masih sedikit, belum terampil dan tersertifikasi untuk mendukung pembentukan kawasan pariwisata andalan. 2. Beberapa kegiatan aktraksi wisata di Kalimantan Timur masih belum terorganisasi secara professional untuk menarik daya wisatawan 3. Infrastruktur di beberapa destinasi pariwisata masih belum memadai menjadi obyek wisata. 4. Aksesibilitas destinasi pariwisata di Kalimantan Timur masih kurang 5. Belum ada lembaga pengelola pariwisata di Kalimantan Timur yang profesional 6. Masih belum adanya jaminan keamanan di destinasi pariwisata 7. Belum adanya regulasi dan kebijakan pengaturan dan pengelolaan destinasi pariwisata di Kalimantan Timur (Rencana Induk Pariwisata Daerah) 8. Belum adanya standar tarif keuangan terhadap destinasi pariwisata di Kalimantan Timur |
| Faktor Pendorong secara Internal meliputi :   1. Pemerintah Provinsi menyusun rencana pengembangan kawasan industri sebagai bagian pembangunan perindustrian di Kaltim; 2. Adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memfasilitasi dan mendorong pelaku industri dalam pembangunan ekonomi daerah; 3. Alokasi anggaran/pembiayaan yang bersumber dari APBD untuk memprioritaskan program pembangunan kawasan industri provinsi sesuai RPJMD yang memiliki daya ungkit yaitu Kawasan Industri Balikpapan dan Kawasan Industri Maloy; 4. Program pengembangan industri yang berdasarkan jalur transportasi udara dan laut yang terhubung dengan jalur perdagangan internasional; 5. Manajemen pembangunan provinsi Kaltim yang mengarahkan pengembangan dan dukungan terhadap pembangunan industri dikarenakan keberadaan sumber daya alam Kaltim yang besar; 6. Perencanaan terhadap konektivitas infrastruktur antara sentra produksi dengan kawasan industri.   Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:   1. Dukungan Kesesuaian Arah kebijakan pembangunan industri di Indonesia di arahkan ke luar Pulau Jawa salah satunya ke Kalimantan Timur 2. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan produksi dan potensi sumber daya alam yang melimpah sehingga memungkinkan pengembangan ekonomi ke arah *economic green* 3. Kondusifitas daerah sebagai upaya mendatangkan iklim investasi yang besar di Kalimantan Timur 4. Keputusan penempatan lokasi Ibu kota negara yang baru dari pemerintah pusat merupakan salah satu pendorong kegiatan ekonomi di Kalimantan Timur 5. Keberadaan jalur laut (ALKI II) dan pelabuhan ekspor di Kalimantan Timur mendorong pengembangan aktifitas produksi sumber daya alam 6. Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan industri di Kalimantan Timur sehingga membuka lapangan kerja bagi masyarakat | Faktor penghambat pencapaian sasaran 10 :   1. Belum adanya regulasi dan kebijakan dalam sistem kendali produksi dan perdagangan sektor industri di Kalimantan Timur 2. Belum adanya program pengembangan industri pengolahan berdasarkan ketersediaan produksi bahan baku sehingga industri di Kalimantan Timur bersifat industri bahan baku 3. Belum ada *mapping* dan *data base* produksi bahan baku yang menjadi suplai bagi industri 4. Belum adanya database SDM terampil dan terlatih yang siap diterima Dunia Usaha Dunia Industri di Kaltim 5. Aksesibilitas kawasan produksi yang belum terkoneksi secara merata dengan kawasan industri di Kaltim 6. Belum adanya ketersediaan regulasi dan kebijakan yang mendorong dan kemudahan berinvestasi di kalimantan Timur 7. Masih rendahnya dukungan pengembangan industri kreatif di Kalimantan Timur |
| Faktor Pendorong secara Internal meliputi :   1. Dukungan pemerintah provinsi untuk mempercepat proses pemberian izin investasi agar mendukung pembangunan ekonomi daerah; 2. Adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memfasilitasi dan mendorong pelaku investasi dengan program promosi dan keterbukaan informasi terhadp potensi sumber daya alam di daerah; 3. Alokasi anggaran/pembiayaan yang bersumber dari APBD untuk memprioritaskan program pembangunan strategis sesuai RPJMD yang memiliki daya ungkit; 4. Sudah terbangun mekanisme komunikasidan koordinasi terhadap perangkat daerah sebagai pengelola sentra produksi dengan Dinas Penanaman Modal agar mendorong iklim invetasi di Kaltim;   Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:   1. Kesesuaian Arah kebijakan pembangunan invetasi nasional dalam memperlancar perizinan investasi di daerah 2. Dukungan Pemerintah Pusat dalam mempermudah investasi di daerah melalui PP No.24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di daerah 3. Kondusifitas daerah sebagai upaya mendatangkan iklim investasi yang besar di Kalimantan Timur 4. Keputusan penempatan lokasi Ibu kota negara yang baru dari pemerintah pusat merupakan salah satu pendorong kegiatan ekonomi di Kalimantan Timur 5. Keberadaan jalur laut dan pelabuhan ekspor di Kalimantan Timur mendorong pengembangan investasi dalam dunia industri 6. Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan industri di Kalimantan Timur | Faktor penghambat pencapaian sasaran 11:   1. Belum adanya sinkronisasi terhadap kebijakan dan regulasi investasi antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah daerah terkait perizinan (perizinan masih ada yang bersifat dikelola daerah dan ada juga yang dikelola pemerintah pusat), pengawasan dan pengendalian system investasi di daerah (system pengawasan dan pengendalian ada yang dikelola pusat misalnya terkait dengan investasi yang melibatkan modal asing) 2. Infrastruktur pelabuhan ekspor masih belum lengkap 3. Masih cukup lamanya proses perizinan investasi sehingga mempengaruhi biaya perizinan investasi di daerah 4. Belum cukupnya ketersediaan energi untuk kebutuhan industri 5. Aksesibilitas antara sentra produksi dengan kawasan industri belum terkonektivitas sehingga investor harus mempersiapkan biaya pembangunan jalan produksi dan pengangkutan. |
| Faktor Pendorong secara Internal meliputi :   1. Sebagai salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi yang diunggulkan dalam rangka pemenuhunan kebutuhan pangan masyarakat di Kaltim; 2. Adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memfasilitasi dan mendorong sektor tanaman pangan dan hortikultura di kaltim berkembang; 3. Alokasi anggaran/pembiayaan yang bersumber dari APBD untuk memprioritaskan program pembangunan strategis sesuai RPJMD yang memiliki daya ungkit; 4. Ketersediaan SDM di lingkup SKPD dan institusi pemerintah serta institusi mitra yang mendukung pengembangan sektor tanaman pangan dan hortikultura di Kaltim; 5. Keberadaan UPTD Pembenihan padi lokal dan tanaman hortikultura berbasis tanaman lokal   Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:   1. Kesesuaian Arah kebijakan pembanguann pertanian nasional yang ditujukan di luar pulau jawa yaitu Kalimantan Timur; 2. Keadaan geografi dan topografi lahan di kaltim yang mendukung pengembangan sektor tanaman pangan dan hortikultura ; 3. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan produksi dan potensi sumber daya alam sektor pertanian tanaman pangan dan hortikulturayang melimpah sehingga memungkinkan pengembangan ekonomi ke arah *economic green* 4. Keputusan penempatan lokasi Ibu kota negara yang baru dari pemerintah pusat merupakan salah satu pendorong kegiatan pengembangan sektor tanaman pangan dan hortikultura dalam upaya pemenuhan masyarakat di ibu kota 5. Peran masyarakat pedesaan di Kalimantan Timur yang kental nuansa budaya dan adat istiadat membantu dalam proses pembangunan pertanian secara berkelanjutan | Faktor penghambat pencapaian sasaran 12 :   1. Belum terkonektivitasnya sentra produksi pertanian dengan kawasan industri pengolahan 2. Rendahnya kesesuaian lahan yang terdapat di RTRW 3. Ketersediaan infrastruktur irigasi yang belum terwakili di seluruh kawasan pertanian 4. Belum adanya regulasi pengawasan dan pengendalian sistem tata niaga pertanian di Kalimantan Timur 5. Belum adanya harmonisasi kebijakan dan regulasi antar perangkat daerah yang mengatur pengembangan aktivitas produksi di kawasan pertanian misalnya keterkaitan pembangunan irigasi dengan kawasan sentra produksi dan program pengembangan industri hilir tidak disertai dengan data produksi dari daerah bahan baku 6. Kurangnya pemanfaatan teknologi tepat guna dalam mendukung produktivitas pertanian. 7. Belum adanya Optimalisasi lahan yang sudah ditetapkan di RTRWP Kaltim 8. Lemahnya peran UPTD dalam mendorong peningkatan ketersediaan benih dan produktivitas padi dan tanaman hortikultura. 9. Belum adanya optimalisasi terhadap peran pertanian sistem berladang (padi ladang) padahal sistem ini merupakan unsur kearifan lokal di Kalimantan Timur. |
| Faktor Pendorong secara Internal meliputi :   1. Salah satu program prioritas dalam pembangunan daerah; 2. Adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memfasilitasi dan mendorong sektor peternakan berkembang dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan protein masyarakat Kaltim; 3. Alokasi anggaran/pembiayaan yang bersumber dari APBD untuk memprioritaskan program pembangunan strategis sesuai RPJMD; 4. Ketersediaan SDM di lingkup SKPD peternakan yang memadai; 5. Keberadaan UPTD Lab Keswan dan Kesmavet yang sudah terakreditasi nasional sebagai unit pengawasan bidang Kesehatan hewan dan masyarakat dalam menjamin kesehatan ternak dan produk asal ternak yang beredar di Kaltim 6. UPTD Pusat Pembibitan dan Inseminasi Buatan Api-Api sebagai tempat pengembang biakan bibit, hijauan pakan ternak dan penangkaran rusa lokal Kaltim   Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:   1. Kesesuaian Arah kebijakan pembangunan peternakan nasional yang menjadikan Kaltim sebagai daerah potensi peternakan di Indonesia 2. Provinsi Kalimantan Timur memiliki beberapa potensi ternak lokal seperti kerbau kalang dan penangkaran rusa 3. Kondusifitas dan keadaan daerah sebagai upaya mendatangkan iklim investasi sektor peternakan yang besar di Kalimantan Timur 4. Keberadaan jalur laut dan pelabuhan ekspor di Kalimantan Timur mendorong pengembangan aktifitas tata niaga sektor peternakan; 5. Peran masyarakat pedesaan di Kalimantan Timur yang kental nuansa budaya dan adat istiadat dalam berternak ; | Faktor penghambat pencapaian sasaran 13 :   1. Belum adanya penetapan kawasan peternakan di RTRW Kalimantan Timur 2. Penggunaan pola peningkatan produktivitas dengan memanfaatkan sistem pengadaan dan mendatangkan ternak dari daerah lain. 3. Belum adanya regulasi pengawasan dan pengendalian system tata niaga peternakan dan produk asal hewan di Kalimantan Timur 4. Rendahnya kesediaan bibit dan bakalan ternak di Kalimantan Timur 5. Belum ada program penguatan keterampilan kelembagaan peternak di Kaltim 6. Kemampuan permodalan peternak di Kaltim yang masib terbatas 7. Belum adanya industri peternakan besar yang bergerak sisi hulu sampai hilir produk ternak di Kaltim 8. Belum adanya industri pakan ternak di Kaltim 9. Tingkat pengetahuan manajemen pemeliharaan ternak oleh peternak yang masih rendah 10. Masih belum lengkapnya sarana dan prasarana pelayanan keswan di Kaltim 11. Rendahnya penguasaan peternak terhadap teknologi pemanfaatan Lahan peternakan sebagai kawasan pengembangan ternak 12. Masih kurangnya sosialisasi dan pelatihan penguasaan teknologi terhadap peternak 13. Kurang jumlah aparatur peternakan seperti inseminator, paramedik veteriner dan petugas medik layanan keswan di Kaltim 14. Belum adanya regulasi tentang pengembangan kawasan peternakan 15. Rendahnya populasi dan produktivitas ternak di kaltim menjadikan keterbatasan pemenuhan kebutuhan daging ternak (ruminansia) |
| Faktor Pendorong secara Internal meliputi :   1. Salah satu program pembangunan prioritas di Kalimantan Timur yang mampu meningkatkan nilai PDRB daerah; 2. Adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memfasilitasi dan mendorong pelaku usaha perkebunan dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah; 3. Keberadaan alokasi perencanaan kawasan perkebunan yang merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia khusunya pada perkebunan kelapa sawit; 4. Alokasi luasan kawasan sudah ada di RTRWP Kaltim; 5. Alokasi anggaran/pembiayaan yang bersumber dari APBD untuk memprioritaskan program pembangunan sektor perkebunan sebagai salah satu sektor strategis yang memiliki daya ungkit terhadap pembangunan ekonomi daerah; 6. Sudah terbangun mekanisme komunikasi dan Koordinasi dengan Pihak swasta yang telah direncanakan setiap periodik dalam bentuk pembahasan harga jual kelapa sawit; 7. Pemerintah Provinsi menyusun rencana pengembangan kawasan industri kelapa sawit sebagai bagian pembangunan perindustrian di Kaltim 8. Komoditi perkebunan lain seperti lada, kopi dan kakao merupakan bagian dari program perangkat daerah dalam mengangkat komoditi lokal menjadi komoditi unggulan.   Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:   1. Kesesuaian Arah kebijakan pembangunan perkebunan nasional yang mendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kaltim 2. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan produksi dan potensi sumber daya alam sektor perkebunan yang melimpah sehingga memungkinkan pengembangan ekonomi ke arah *economic green* 3. Keberadaan jalur laut dan pelabuhan ekspor di Kalimantan Timur mendorong pengembangan aktifitas produksi sektor perkebunan sebagai komoditi ekspor nasional 4. Potensi keadaan alam di Kalimantan Timur yang sangat mendukung pengembangan tanaman perkebunan di kaltim 5. Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur 6. Sektor perkebunan merupakan salah satu sektor yang mampu menjadi mata pencaharian utama masyarakat di Kaltim | Faktor penghambat pencapaian sasaran 14 :   1. Belum terkonektivitasnya sentra produksi perkebunan dengan kawasan industri pengolahan 2. Rendahnya kesesuaian lahan perkebunan yang terdapat di RTRW 3. Masalah lahan bagi pengembangan kebun baru di perkebunan yang diakibatkan ketidaktuntasan kesesuaian RTRWP 4. Belum adanya industri hilir (hilirisasi industri) sektor perkebunan 5. Aksesibilitas kawasan perkebunan di kaltim masih rendah 6. Program pengembangan sektor perkebunan lebih memfokuskan kepada komoditi kelapa sawit padahal terdapat komoditi yang lain sebagai potensi unggulan 7. Belum ada database produksi sektor perkebunan sehingga perhitungan berdasarkan laporan perusahaan 8. Belum adanya regulasi pengawasan dan pengendalian tata niaga perkebunan dan produk perkebunan di Kalimantan Timur 9. Belum adanya harmonisasi kebijakan dan regulasi antar perangkat daerah yang mengatur pengembangan aktivitas produksi di sektor perkebunan di Kaltim seperti pengembangan industry hilir yang menjadi program Disperindagkop belum disertai dengan data produksi dari daerah bahan baku yang dikelola Dinas Perkebunan. 10. Masih kurangnya SDM di perangkat daerah sektor perkebunan dalam melakukan kontrol dan evaluasi produksi industri perkebunan |
| Faktor Pendorong secara Internal meliputi :   1. Sektor perikanan dan kelautan sebagai salah satu program prioritas pembangunan di Kaltim 2. Adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memfasilitasi dan mendorong pelaku usaha perikanan dalam meningkatan produktifitas sektor perikanan dan kelautan Kaltim; 3. Alokasi anggaran/pembiayaan yang bersumber dari APBD untuk memprioritaskan program pembangunan sektor perikanan dan keuatan sebagai salah satu sektor strategis sesuai RPJMD yang memiliki daya ungkit; 4. Adanya pelimpahan kewenangan dari implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014; 5. Ketersediaan aksesibilitas dan fasiltas pengembangan benih perikanan khususnya ikan laut dan udang; 6. Pemerintah Provinsi menyusun rencana pengembangan kawasan sektor perikanan dan kelauatan melalui RZWP3K sebagai bagian pembangunan sektor perikanan dan kelautan di Kaltim;   Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:   1. Kesesuaian Arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan daerah dalam mengembangkan sektor perikanan dan kelautan 2. Provinsi Kalimantan Timur merupakansalah satu daerah yang memiliki wilayah pesisir perikanan dan kelautan yang paling panjang di Indonesia 3. Wilayah Pesisir Kelautan di kaltim merupakan daerah “fishing ground” yang kaya akan jenis-jenis ikan konsumsi dan komersil 4. Tipe perairan di kaltim meliputi perikanan dermasal (dasar laut) yang sangat beraneka ragam hasil laut seperti ikan, kerang dan udang. 5. Keberadaan jalur laut dan pelabuhan ekspor di Kalimantan Timur yang berada di zona eksklusif ekonomi di Laut Sulawesi dan jalur perairan internasional 6. Adanya latar belakang social budaya masyarakat kaltim yang berada dipesisir sebagai nelayan sehingga mendukung pembangunan sektor perikanan dan kelautan di Kalimantan Timur. | Faktor penghambat pencapaian sasaran 15 :   1. Belum ditetapkannnya Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebagai bagaian penataan ruang wilayah pesisir dan kelauatan Kaltim 2. Belum optimalnya pengawasan UU fishing di wilayah kelautan yang menjadi hak pengelolaan suatu provinsi ( 0 – 12 mil) 3. Belum optimalnya peningkatan kapasitas perangkat daerah SDM kelautan dan perikanan terutama dalam hal perencanaan, pengawasan dan pengendalian kawasan perikanan dan kelautan 4. Belum optimalnya industri pengolahan perikanan di Kaltim sehingga hasil tangkapan perikanan dan kelautan langsung masuk di sistem perdagangan 5. Masih rendahnya pemanfaatan iptek kelautan dan perikanan serta diseminasi teknologi oleh nelayan-nelayan di Kaltim 6. Belum optimalnya pengawasan system kendali dan tata kelola Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Kaltim 7. Belum adanya harmonisasi kebijakan dan regulasi antar perangkat daerah yang mengatur pengembangan aktivitas produksi di sektor perikanan dan kelautan di Kaltim seperti adanya program dari Disperindagkop dalam mengembangkan industry hilir hasil perikanan dan kelautan namun belum disertai dengan data produksi dari daerah bahan baku yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan 8. Masih rendahnya program pemberdayaan nelayan-nelayan di Kaltim 9. Belum optimalnya peran UPTD Pembenihan dalam mendukung penyediaan benih dan produktivitas kawasan perikanan. |
| Faktor Pendorong secara Internal meliputi :   1. Sektor Kehutanan merupakan salah satu sektor yang menjadi program prioritas pembangunan daerah; 2. Adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mendorong sektor kehutanan sebagai penyumbang nilai PDRB daerah; 3. Adanya alokasi anggaran/pembiayaan yang bersumber dari APBD untuk memprioritaskan program pembangunan sektor kehutanan; 4. Adanya pelimpahan kewenangan pengelolaan kawasan kehutanan dari implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014; 5. Pengelolaan hutan dalam unit pengelolaan berbentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang berjumlah 20 unit; 6. Keberadaan masyarakat perhutanan sosial terutama hutan adat di Kaltim yang dinanungi oleh Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hokum adat yang salah satu isinya adalah pelestarian tentang hutan adat 7. Pemerintah Provinsi menyusun rencana pengembangan kawasan kehutanan yang disesuaikan dengan RTRWP Kaltim   Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:   1. Potensi keadaan kawasan hutan di Kaltim yang masih sangat besar sehingga menjadi penyumbang PDRB daerah maupun PDRB Nasional 2. Kesesuaian Arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan global yang bertujuan pembangunan hutan secara berkelanjutan 3. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia yang menjadi paru-paru dunia sehingga upaya pelestarian hutan sangat diutamakan; 4. Sektor industri hasil hutan merupakan salah satu sektor yang mampu menyerap lapangan kerja di Kaltim 5. Peran masyarakat di Kalimantan Timur yang kental nuansa budaya dan adat istiadat membantu dalam proses pembangunan hutan secara berkelanjutan | Faktor penghambat pencapaian sasaran 16 :   1. Belum adanya harmonisasi kebijakan dan regulasi antar perangkat daerah yang mengatur pengembangan aktivitas produksi di sektor kehutanan di Kaltim misalnya Pegelolaan Pengawasan dan Pengendalian jalur perdagangan hasul kayu yang bisa melibatkan 2 perangkat daerah yaitu Dinas Perhubungan (sebagai penanggungjawab pengawasan angkutan) dan Dinas Kehutanan (sebagai penanggung jawab pengelolaan kawasan kehutanan) 2. Belum optimalnya peran UPTD Pembenihan dalam mendukung penyediaan benih dan produktivitas kawasan perikanan 3. Belum adanya regulasi dan kebijakan terhadap pengawasan dan pengendalian produksi dan perdagangan sumberdaya alam secara langsung dari perangkat daerah. 4. Aksesibilitas produksi dari kawasan produksi ke pusat pelayanan ekonomi belum terkoneksi dengan baik sehingga terjadi sistem perdagangan sumberdaya alam tidak keluar pada pusat pelayanan ekonomi yang telah ditetapkan. 5. Jumlah dan pengelolaan terminal produksi belum tertata dan terdokumentasi secara baik 6. Belum adanya sistem kendali bahan baku industri kehutanan untuk mendorong program hilirisasi industry kehutanan 7. Besarnya peran swasta dan masyarakat dalam menggerakan pertumbuhan ekonomi tanpa bisa diimbangi peran perangkat daerah dalam mendukung kegiatan tersebut 8. Belum adanya data base produksi sumber daya alam di kawasan produksi yang dibuat perangkat daerah sebagai penanggung jawab kawasan 9. Perencanaan program kerja perangkat daerah belum berbasis geospasial, geoekonomi dan geososiokultur sehingga potensi dan pengelolaan kawasan belum optimal 10. Kekurangan SDM dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sistem tata kelola produksi kawasan |
| Faktor Pendorong secara Internal meliputi :   1. Sebagai salah satu program pembangunan daerah yang strategis dikarenakan terkait dengan pendanaan pembangunan daerah 2. Adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memfasilitasi dan mendorong optimalisasi pendapatan daerah; 3. Ketersediaan SDM di lingkup SKPD pendapatan daerah yang memiliki kompetensi untuk mendukung pencapaian program; 4. Pelimpahan kewenangan pemerintah daerah sebagai bagian dari implementasi UU Nomor 23 tahun 2014;   Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:   1. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan produksi dan potensi sumber daya alam yang melimpah sehingga memungkinkan sebagai potensi penerimaan daerah; 2. Keputusan penempatan lokasi Ibu kota negara yang baru dari pemerintah pusat menjadikan adanya penambahan transfer dana pembangunan bagi Kaltim 3. Keberadaan jalur laut dan pelabuhan ekspor di Kalimantan Timur mendorong pengembangan aktifitas produksi sumber daya alam sebagai bagian dari pendapatan daerah; 4. Potensi keanekeragaman hayati dan keadaan alam di Kalimantan Timur yang sangat bervariasi menjadikan potensi sebagai sumber pendapatan daerah 5. Adanya partisipasi masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung pembangunan di Kalimantan Timur dengan cara melakukan pembayaran pajak daerah. | Faktor penghambat pencapaian sasaran 17 :   1. Belum adanya regulasi dari perangkat daerah yang berbasis pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas ekonomi di kawasan produksi sehingga masih belum terdata potensi penerimaan daerah yang ada di Kaltim 2. Belum adanya data base produksi sumber daya alam di kawasan produksi yang menjadi potensi penerimaan daerah 3. Perencanaan program kerja perangkat daerah bidang pendapatan belum berbasis geospasial dan geoekonomi belum optimal dalam mengeksplorasi potensi pendapatan daerah 4. Kekurangan SDM dalam melakukan pengawasan dan pengendalian potensi penerimaan daerah 5. Jumlah UPTD Pendapatan sebagai pelaksana teknis masih sedikit. 6. Program kegiatan yang direncanakan hanya bersifat rutinitas sehingga inovasi untuk menemukan sumber pendapatan baru masih belum maksimal 7. Program menemukan sumber pendapatan baru tidak dilaksanakan pada tahun anggaran 2019. 8. Faktor kekurangan SDM di UPTD menyebabkan upaya untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemungutan retribusi dan pajak belum maksimal. 9. Belum adanya revisi regulasi dan kebijakan tentang keterbaruan struktur pendapatan daerah Kalimantan Timur. |

**Rekomendasi tindak lanjut terhadap pencapaian Misi 2** adalah

Rekomendasi terhadap pelaksanaan RPJMD pada misi 2 “Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan” adalah

1. Diperlukan adanya program kegiatan yang bertujuan sinkronisasi peraturan perundang-undangan (berdasar pada UUD 1945, UU 23/2014 tentang Pemerintahan, UU sektor), UU 33/2004 tentang Bagi Hasil dan kebijakan (Peraturan-peraturan Menteri) pengelolaan sumberdaya alam antara pemerintah yang membatasi kewenangan pemerintah daerah, khususnya pemerintah Provinsi oleh perangkat daerah sebagai penanggung jawab kawasan.
2. Perlunya program kerja dan kegiatan serta regulasi yang mengatur Tata Niaga hasil-hasil produksi sumberdaya alam di daerah dengan Melakukan Pembatasan Penjualan bahan Baku Industri keluar Provinsi Kalimantan Timur yang diperkuat dengan Peraturan Daerah.
3. Penguatan pemahaman aparatur perangkat daerah dalam penyusunan perencanaan program berbasis kemampuan wilayah seperti geospasial, geoekonomi, geososiokultur dan geostrategi terutama kesesuaian dalam pencapaian program prioritas RPJMD
4. Perlunya program kegiatan dan regulasi di daerah oleh perangkat daerah untuk melakukan “audit produksi kawasan sumberdaya alam”, pengawasan dan pengendalian produksi dan produktifitas hasil-hasil sumberdaya alam .
5. Program Valuasi terhadap perijinan yang belum melakukan aktifitas sebagai langkah untuk melakukan penertiban dan penataan ijin-ijin investasi.
6. Review oleh OPD terhadap pemanfaatan dan kesesuaian Penataan Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten untuk melakukan verifikasi dan sinkronisasi kemampuan lahan bagi usaha pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan hortikulura dikarenakan masih terdapat belum sinkronisasi kebijakan pembangunan pada sektor-sektor tersebut antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mempengaruhi terhadap pendapaian visi misi Pemerintah Provinsi.
7. Program akselerasi dan inovatif terhadap pelaksanaan dan pengawasan periijinan investasi usaha di Kalimantan Timur.
8. Perlunya program kegiatan yang mengarah pembangunan industry kreatif sebagai bagian sinkronisasi program pemerintah provinsi dengan kondisi perkembangan teknologi manusia (revolusi industry 4.0).
9. Peningkatan kinerja perangkat daerah pada sektor-sektor strategis untuk meningkatkan produktifitas kawasan dan penerimaan daerah.
10. Membangun sistem koordinasi yang intensif antara perangkat daerah pengendali produksi bahan baku dengan DISPERINDAGKOP.
11. Diperlukan adanya program kegiatan yang berfungsi pada pengawasan dan pengendalian sebagai titik kendali dan kontrol aktivitas tata niaga hasil produksi kawasan di daerah.
12. Diperlukan pembuatan produk hukum daerah dan kebijakan tentang Pengelolaan sumberdaya kawasan mulai tahapan perencanaan, pengawasan dan pengendalian produksi dan pemasaran produk kawasan yang melibatkan lintas OPD.
13. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam program meningkatkan penerimaan daerah adalah sebagai berikut:
14. Review terhadap pengaturan pungutan dari produksi kelapa sawit (CPO, PKO, Biofuel) dengan segala turunannya termasuk industri limbah yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.
15. Telaah Kebijakan retribusi perdagangan bahan baku TBS, Kernel, Limbah, dan produksi perkebunan lainnya (Kopi, Karet, Kakao, Lada, dll), jasa angkutan, pelabuhan khusus, Ijin Mendirikan Bangunan dan atau pembangunan Industri.

***Misi 3 :*** Pada misi 3 meliputi tujuan 5 yakni meningkatkan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar, yang terdiri dari 5 sasaran dan 8 program. Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD didapatkan bahwa capaian kinerja pada tujuan 5 memiliki capaian yang sangat tinggi sesuai dengan target dan indikator yang ditetapkan pada tahun 2018 (100%). Hal ini menunjukkan bahwa indikator tujuan 5 pada misi 3 untuk meningkatkan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar sudah memenuhi target pencapaian berdasarkan indeks Gini (*Gini ratio*). Pencapaian tujuan tersebut menunjukan adanya pemerataan infrastruktur yang dibangun pemerintah provinsi yang berdampak terhadap masyarakat di Kalimantan Timur.

Terdapat 5 sasaran pada misi 3 yaitu meningkatnya aksesibilitas wilayah, meningkatnya konektivitas antar kawasan, meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air, menurunnya kawasan kumuh dan terpenuhinya kebutuhan energi daerah. Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD pada Misi 3 terdapat 3 sasaran yang memiliki capaian kinerja yang sangat tinggi atau target pencapaian sudah memenuhi, dengan 2 sasaran lain yang nilai pencapaiannya sangat rendah. Hal ini mengakibatkan indikator sasaran pada misi 3 secara keseluruhan memiliki ketercapaian. Namun terdapat hal yang menjadi perhatian pada pencapaian misi 3 ini yaitu masih rendahnya aksesibilitas wilayah terutama terkait dengan jumlah penumpang yang terlayani dan jumlah barang yang dilayani. Temuan ini menjadikan pekerjaan rumah yang harus bisa diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi dalam upaya mewujudkan kedaulatan dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur wilayah di Kalimantan Timur. Terdapat juga tugas tambahan terutama terkait dengan diversifikasi energy. Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki nilai potensi energy terbarukan (EBT) terbesar di Indonesia mulai dari sumber daya alam (sungai) dan hasil industry terutama hasil industry kelapa sawit (POME yang bisa menjadi pembangkit listrik). Namun dikarenakan belum ada harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah terhadap pemanfaatan EBT maka potensi ini bisa menjadi hilang. Upaya inilah yang menjadi tugas tambahan pemerintah provinsi melalui perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program diversifikasi energy ini.

Berdasarkan program priorotas yang terdapat pada misi 3 yaitu **8 program**, keseluruhan **memiliki nilai capaian yang sangat tinggi**. Program-program tersebut adalah (1) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan ; (2) Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP ; (3) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan ; (4) Program Pengelolaan Sumber Daya Air ; (5) Program Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan ; (6) Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman ; (7) Program Diversifikasi Energi ; (8) Program Pengembangan Ketenagalistrikan

**Faktor pendorong dan penghambat** terhadap pencapaian pada misi 3 adalah

| **Faktor** | |
| --- | --- |
| **Pendorong** | **Penghambat** |
| Faktor Pendorong secara Internal meliputi :   1. Alokasi anggaran/pembiayaan yang bersumber dari APBD untuk memprioritaskan program peningkatan aksesibilitas wilayah di Kaltim; 2. Adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memfasilitasi dan mendorong konektivitas antar wilayah terutama untuk menyikapi akses terjauh, terluar dan tertinggal (3T); 3. Sudah terbangun mekanisme komunikasi - Koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengimplementasikan program pembangunan peningkatan aksesibilitas wilayah yang telah direncanakan setiap periodik; 4. Pemerintah Provinsi menyusun rencana pembangunan daerah dengan berdasarkan tingkat aksesibilitas dan konektivitas pengembangan kawasan di Kaltim; 5. Program sosialisasi pemerintah provinsi terhadap penggunaan sarana dan prasarana transportasi umum   Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:   1. Kesesuaian Arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dari Pemerintah Pusat dalam rangka meningkatkan aksesibilitas wilayah 3T (terluar, terjauh dan tertinggal) 2. Angkutan sungai merupakan salah satu angkutan yang masih digunakan oleh sebagian masyarakat di Kaltim 3. Peran masyarakat pedesaan di Kalimantan Timur yang kental nuansa budaya dan adat istiadat yang melekat terhadap keberadaan sungai | Faktor Penghambat Pencapaian Sasaran 18:   1. Kondisi geografi dan topografi Kaltim yang luas dan bervariasi 2. Masih kecilnya dana pembangunan (APBD) Kaltim sehingga belum optimalnya peningkatan aksesibilitas wilayah 3. Masih rendahnya pola kesesuaian ruang antara kawasan produksi dengan kawasan lain di dalam RTRW Provinsi dan Kab/Kota yang menyebabkan akses 4. Sarana dan prasarana pembangunan aksesibilitas daerah terkendala dengan harga bahan baku yang mengikuti keberadaan lokasi daerah pembangunan sehingga biaya pembangunan menjadi mahal ; 5. Belum adanya harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dalam pengelolaan jalur transportasi misalnya pelabuhan dan bandara |
| Faktor Pendorong secara Internal meliputi :   1. Kaltim sangat kaya dengan potensi produksi sumber daya alam yang merupakan produk dari kawasan; 2. Adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memfasilitasi dan mendorong pembangunan dan konektivitas antar kawasan untuk meningkatkan nilai PDRB daerah; 3. Alokasi anggaran/pembiayaan yang bersumber dari APBD untuk memprioritaskan program pembangunan konektivitas antar kawasan sebagai program strategis; 4. Pemerintah Provinsi menyusun rencana pengembangan kawasan industri sebagai bagian pembangunan perindustrian di Kaltim; 5. Sebagai program prioritas didukung dengan alokasi pendanaan dari APBD   Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:   1. Kesesuaian Arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar kawasan secara nasional 2. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan produksi dan potensi sumber daya alam yang melimpah di kawasan sehingga memungkinkan pembangunan ekonomi ke arah *economic green* 3. Keberadaan jalur laut dan pelabuhan ekspor di Kalimantan Timur mendorong pengembangan aktifitas produksi sumber daya alam di kawasan-kawasan produksi 4. Peran masyarakat di pelosok yang mendukung pembangunan pedesaan di Kalimantan Timur yang kental nuansa budaya dan adat istiadat membantu dalam proses pembangunan secara berkelanjutanagar meningkatkan pemerataan pembangunan di Kaltim; 5. Sebagai bagian dari program pembangunan berkelanjutan (*SDGs programme*) | Faktor penghambat Sasaran 19:   1. Program dan kegiatan untuk konektivitas antar kawasan harus bisa disinkronkan dengan perangkat daerah yang lain sebagai pengelola kawasan produksi 2. Masih terdapat disharmoni regulasi kebijakan antar pengelola kawasan sentra produksi sehingga belum terbangun konektivitas; 3. Aktivitas kawasan produksi yang relatif bergerak secara parsial-parsial; 4. Topografi dan geografi Kaltim yang sangat luas 5. Belum optimalnya dukungan pembiayaan pembangunan antar kawasan dari kabupaten/kota di Kaltim |
| Faktor Pendorong secara Internal meliputi :   1. Program prioritas yang mendaptkan dukungan alokasi pendanaan dari APBD; 2. Adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memfasilitasi dan mendorong pemerataan infrastruktur air bersih ke masyarakat Kaltim; 3. Pemerintah Provinsi menyusun rencana pengembangan antar kawasan yang disertai dengan penyediaan infrastruktur air bersih 4. Upaya untuk meningkatkan kedaulatan ekonomi wilayah maka program ini menjadi program pendukung yang memiliki daya ungkit pencapaian misi.   Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:   1. Kesesuaian Arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan global (SDGs) terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat 2. Peran masyarakat pedesaan di Kalimantan Timur yang kental nuansa budaya dan adat istiadat yang bermukim di sepanjang pesisir sungai dan laut; 3. Kondisi alam di Kaltim yang di dominasi dengan sungai, rawa dan danau sehingga sangat potensi sebagai penyediaan sumber air bagi masyarakat | Faktor penghambat pencapaian sasaran 20:   1. Pengimplementasian program menjadi ke arah penanganan banjir sehingga menjadi program kurang tepat sasaran. 2. Belum adanya kebijakan antar perangkat daerah dalam upaya mengkonektivitaskan kawasan dalam upaya pengelolaan SDA salah satunya ketersediaan infrastruktur sumber daya air seperti irigasi dengan lahan pertanian 3. Keterbatasan lahan pembangunan infrastruktur sumber daya air 4. Masih kentalnya budaya masyarakat di Kaltim yang memanfaatkan air sungai, danau dan rawa secara langsung 5. Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana penyedia air baku bagi masyarakat 6. Pelaksanaan operasi pemeliharaan yang belum optimal terhadap infrastruktur sumber daya air yang ada. |
| Faktor Pendorong secara Internal meliputi :   1. Sebagai program prioritas dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berdasar pada ekonomi berkelanjutan; 2. Adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memfasilitasi dan mendorong menurunkan kawasan kumuh di kota; 3. Alokasi anggaran/pembiayaan yang bersumber dari APBD untuk memprioritaskan program pembangunan strategis; 4. Sudah terbangun mekanisme komunikasi - Koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/kota dalam upaya menata kawasan kumuh perkotaan yang direncanakan setiap periodik;   Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:   1. Kesesuaian Arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan global yang berkelanjutan (SDGs) 2. Provinsi Kalimantan Timur hanya memiliki 3 kota besar sehingga penanganan kawasan kumuh perkotaan masih dapat cepat teratasi 3. Keputusan penempatan lokasi Ibu kota negara yang baru dari pemerintah pusat merupakan salah satu pendorong kegiatan pembangunan kemandirian ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. | Faktor penghambat pencapaian sasaran 21 :   1. Belum ada *mapping* dan *data base* penanganan dan penataan kawasan kumuh di beberapa kota di Kaltim 2. Belum adanya peran kesadaran masyarakat dalam menata pemukiman 3. Belum adanya ketersediaan regulasi dan kebijakan yang mendorong penataan pemukiman di kota agar tidak berubah menjadi kawasan kumuh. 4. Pembangunan dan penataan kawasan pemukiman akan beriringan dengan tingkat ekonomi masyarakat |
| Faktor Pendorong secara Internal meliputi :   1. Sebagai program prioritas dalam upaya Kaltim mandiri dan berdaulat terhadap energi dan energi terbarukan; 2. Sinkronisasi antgar perangkat daerah Kaltim dalam mendorong pengelolaan energi terbarukan 3. Alokasi anggaran/pembiayaan yang bersumber dari APBD untuk memprioritaskan program pembangunan strategis; 4. Ketersediaan SDM di lingkup SKPD dan institusi pemerintah serta institusi mitra yang memenuhi kualifikasi kompetensi untuk mendukung program pengembangan energy terbarukan di Kaltim; 5. Pemerintah Provinsi sudah menyusun rencana pengembangan dan pemanfaatan energi (*non renewable energy* dan *renewable energy*) di Kaltim   Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:   1. Kesesuaian Arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan global yang bertujuan pemanfaatan energi secara berkelanjutan dan terbarukan 2. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan potensi produksi sumber energi terbarukan 3. Keputusan penempatan lokasi Ibu kota negara yang baru dari pemerintah pusat merupakan salah satu pendorong kegiatan pembangunan energi (*renewable energy and non renewable energy*) di Kalimantan Timur 4. Kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan energi yang sangat besar; 5. Ketersediaan energi terbarukan yang sangat besar dari limbah kelapa sawit yang dikelola oleh Pabrik kelapa sawit di Kaltim. 6. Sungai Mahakam sebagai sa lah satu sungai terbesar di Indonesia yang memiliki potensi sebagai sumber energi yang potensial | Faktor penghambat pencapaian sasaran 22:   1. Belum adanya harmonisasi kebijakan antara pemerintah daerah dengan perusahaan negara yaitu PLN dalam pemanfaatan energi terbarukan yang ada di Kaltim 2. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang menyebabkan pembangunan jaringan listrik masih agak sulit menembus di daerah pedalaman; 3. Belum adanya regulasi baik di secara nasional maupiun di daerah terhadap mendorong pemanfaatan energi terbarukan khususnya pada sektor limbah perkebunan kelapa sawit |

**Rekomendasi tindak lanjut terhadap pencapaian Misi 3** adalah

1. Program perencanaan kawasan yang dikelola oleh perangkat daerah harus berbasis geospasial, geoekonomi, geososiokultur dan geostrategi sehingga peningkatan aksesibilitas antar wilayah kawasan terintegrasi dengan baik.
2. Perlunya penguatan manajemen pengelolaan dan pemahaman perencanaan berbasis pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi dan berbasis geospasial, geoekonomi dan geososiokultur sehingga program kegiatan bukan sekedar pengerjaan program rutinitas untuk mendukung kinerja perangkat daerah
3. Melakukan sinkronisasi terhadap indikator kinerja antar perangkat daerah terutama yang berbasis kawasan agar terjadi konektivitas perencanaan pembangunan di kawasan seperti sinkronisasi pembuatan irigiasi / pengairan air dengan lahan pertanian
4. Menyelaraskan kembali indikator sasaran, program dan komponen kegiatan yang dilaksanakan agar membantu dalam pencapaian Visi dan Misi terutama terhadap program pembangunan aksesibilitas wilayah
5. Evaluasi dilakukan dalam penyusunan perencanaan anggaran dan kebijakan sesuai sasaran sehingga menghilangkan program yang dibuat berdasarkan program yang tidak tepat sasaran misalnya sasaran untuk pemenuhan layan air maka di arahkan bentuk kegiatan dalam upaya pemenuhan air bersih bagi masyarakat.
6. Adanya harmonisasi perangkat daerah di tingkat provinsi dalam mendukung upaya pemerataan pembangunan sebagai dasar pemenuhan infrastruktur wilayah terutama terhadap pengelolaan jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota
7. Harmonisasi kebijakan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya menurunkan kawasan pemukiman kumuh di perkotaan
8. Penyelarasan dan penguatan peran pemerintah provinsi dengan PLN dalam mengelola dan memanfaatkan energi terbarukan di Kaltim. Pembuatan regulasi kebijakan pemanfaatan energi terbarukan pada sektor limbah kelapa sawit yang sangat besar di Kaltim

***Misi 4 :*** Pada misi 4 meliputi tujuan 6 yakni meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dimana terdiri dari 3 sasaran dan 5 program. Berdasarkan hasil evaluasi pada tujuan 6 bahwa indikator yang ditetapkan pada tahun 2018 telah mencapai targetnya (100%). Hal ini menunjukkan bahwa indikator tujuan 6 pada misi 4 untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup sudah memenuhi target pencapaian. Hal ini menunjukan bahwa kualitas lingkungan hidup di Kalimantan Timur selalu meningkat. Upaya pemerintah provinsi dalam mengendalikan kerusakan lingkungan selalu berhasil sehingga permsalahan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan adanya aktivotas eksploitasi lingkungan bisa ditangani. Selain itu, kesiapan Pemerintah provinsi terhadap penanggulangan bencana juga menjadi perhatian yang sangat penting oleh Pemerintah Provinsi. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya koordinasi yang baik dan rapi antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kota/kabupaten pada saat penanggulangan bencana.

Terdapat 5 program yang terbagi ke dalam 3 sasaran pada Misi 4 yakni dua program di sasaran 23; dua program di sasaran 24; dan satu program di sasaran 25. Berdasarkan hasi evaluasi menunjukkan bahwa t**erdapat 3 (tiga) program yang memiliki nilai capaian yang sangat tinggi** yaitu (1) Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup ; (2) Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah ; (3) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang. **Terdapat 1 program yang memiliki nilai capaian yang sangat rendah** yaitu Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana, yang dikarenakan masih terdapatnya kekurangan anggaran akibat wilayah geografi Kalimantan timur yang sangat luas. Hal yang menjadi perhatian adalah terdapatnya **1 (satu) program yang tidak dilaksanakan** pada tahun 2019 yaitu Program Tata Lingkungan. Secara umum ketercapaian program prioritas pada misi 4 ini sudah memenuhi namun masih banyak tugas yang harus dikerjakan agar semua program dapat direalisasikan dalam upaya pencapaian Visi Misi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

**Faktor pendorong dan penghambat** terhadap pencapaian pada misi 4 adalah

| **Faktor** | |
| --- | --- |
| **Pendorong** | **Penghambat** |
| Faktor Pendorong sasaran 23 :   1. Adanya komitmen kepala daerah dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang berdaulat 2. Adanya regulasi yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup, terutama adanya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Dukungan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 4. Penurunan kualitas lingkungan hidup terutama perubahan iklim menjadi isu global yang menjadi perhatian internasional maupun nasional. 5. Adanya peluang bantuan pusat maupun internasional dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup terutama yang berkaitan dengan penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) 6. Adanya kesadaran dan sinergitas pemangku kepentingan (stakeholders) baik pemerintah, swasta, akademisi, pemerhati dan komunitas lingkungan, dan masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup | Faktor penghambat sasaran 23 :   1. Keterbatasan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup 2. Masih kurangnya SDM baik dari segi kuantitas ataupun kualitas dalam pengelolaan sumber daya alam 3. Keterbatasan database serta informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup 4. Belum optimalnya pengelolaan SDA dan lingkungan hidup terkait dengan minimnya anggaran |
| Faktor Pendorong sasaran 24 :   1. Tersedianya regulasi yang mendukung dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana 2. Adanya kemitraan antar *stakeholders* baik pemerintah, dunia usaha, lembaga usaha masyarakat, Forum Kaltim Peduli Bencana, dan kemitraan dari luar negeri dalam penanggulangan bencana 3. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Lembaga Legistatif dalam penanggulangan bencana 4. Adanya program prioritas desa tangguh bencana yang menjadi program unggulan | Faktor penghambat sasaran 24 :   1. Lemahnya Koordinasi baik internal dan eksternal di lingkungan SKPD termasuknya adanya ego sektoral 2. Belum lengkapnya standar operasional prosedur termasuk dalam pelaksanaannya 3. Terbatasnya SDM baik dari segi jumlah dan kemampuan individu dalam melaksanakan fungsi pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 4. Keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana 5. Dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak bencana, masih terdapat basis data yang tidak mutakhir dan reguler, tidak akuratnya penilaian kerusakan dan kerugian pasca panen, terbatasnya peta wilayah dalam menganalisa kerusakan parsial, dan alokasi pendanaan yang terbatas 6. Rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana |
| Faktor pendorong sasaran 25 :   1. Tersedianya regulasi yang mendukung dalam penyelenggaraan penataan ruang 2. Adanya komitmen kepala daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang 3. Adanya dukungan anggaran baik dari pusat maupun daerah | Faktor penghambat sasaran 25 :   1. Masih adanya ketidaksesuaian Perda RTRW antara provinsi dengan kabupaten/kota terutama pada struktur dan pola ruang 2. Tidak optimalnya pengendalian dan pengawasan yang terstruktur, akurat, dan cepat akibat dari tidak lengkapnya Rencana Rinci Tata Ruang KSP yang berkekuatan hukum 3. Masih tingginya perubahan alih fungsi lahan dan inkonsistensi kebijakan terhadap rencana tata ruang 4. Partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi penetapan penataan ruang masih rendah |

**Rekomendasi tindak lanjut terhadap pencapaian Misi 4** adalah

1. Pada Misi Empat “Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan” dirasakan memerlukan tambahan tujuan yang mampu menjabarkan dari pernyataan misi tersebut serta menyelaraskan sasaran yang sudah ada. Pernyataan Tujuan 6 yaitu “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup” dapat diganti dengan pernyataan “Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup” dengan mengganti pernyataan tujuan yang lama ke dalam sasaran baru yaitu “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup” dengan menggunakan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan Program Kinerja melalui peningkatan kualitas air sungai kualitas udara ambien dan kualitas tutupan lahan. Selanjutnya tambahan tujuan untuk penjabaran Misi Empat adalah “Peningkatan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim Dan Pembangunan Rendah Karbon” dengan menggunakan sasaran yang sudah ada yakni “Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)”, “Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana”, dan “Meningkatnya Kinerja Penyelengaraan Penataan Ruang”.
2. Evaluasi dapat dilakukan diawal dalam tahap perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKPD) dengan menyelaraskan dengan RPJMD Kaltim, sehingga dalam pengusulan program dan kegiatan dapat sejalan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran termasuk indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kaltim.
3. Perlunya penguatan manajemen pengelolaan dan pemahaman perencanaan berbasis pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi bukan sekedar pengerjaan rutinitas untuk mendukung program kinerja perangkat daerah
4. Perlunya penguatan manajemen pengelolaan data pada setiap SKPD yang dikoordinir oleh Bappeda dalam pelaporan hasil capaian kinerja dan juga dilakukan evaluasi oleh gubernur kepada SKPD atas capaian indikator kinerja yang rendah dan juga yang tidak memberikan data capaian dalam penyusunan laporan tahunan gubernur melalui program *reward* and *punishment*.
5. Melakukan sinkronisasi terhadap indikator kinerja dengan melakukan pembobotan indikator indeks komposit pada setiap indikator tujuan, sasaran, program, dan kegiatan secara hirarki dan berkaitan sehingga setiap pencapaian target indikator kinerja dapat dianalisis dan ditelusuri sumber pencapaiannya agar dampak dan daya ungkit pada masing-masing unsur dapat diketahui.
6. Menyelaraskan kembali antara misi, tujuan, dan sasaran RPJMD dengan program SKPD termasuk menciptakan daya ungkit melalui perubahan-perubahan indikator kinerja program yang kurang tepat dan kegiatan (*output*) yang masih bersifat *output non strategies* yang tidak dapat menggambarkan kinerja dari program tersebut.
7. Evaluasi dilakukan dalam penyusunan perencanaan anggaran dan kebijakan yang harus disesuaikan dengan capaian target kinerja melalui analisa kebutuhan, sehingga alokasi anggaran untuk kegiatan program dan kegiatan lebih realistis dan efisien.

***Misi 5 :*** Pada misi 5 meliputi tujuan 7 yakni mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pelayanan publik, dimana terdiri dari 3 sasaran dan 8 program. Berdasarkan hasil evaluasi dapat disampaikan bahwa indikator yang ditetapkan pada tahun 2018 telah mencapai target sangat tinggi (99.18%). Hal ini menunjukkan bahwa indikator tujuan 7 pada misi 5 untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pelayanan publik dengan indikator indeks reformasi birokrasi sudah memenuhi target pencapaian. Kinerja pembangunan misi 5 sudah mengarah terhadap terwujudnya pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang jujur, bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik sebagai pengejawantahan dari prinsip-prinsip dasar *good and clear governance*. Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan.

Pada Misi 5 terdapat 8 program yang terbagi ke dalam 3 sasaran pada Misi 5 yakni tiga program di sasaran 26; tiga program di sasaran 27; dan dua program di sasaran 28. Berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan terdapat **6 program yang memiliki nilai pencapaian yang sangat tinggi** yaitu (1) Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja ; (2) Program Penguatan Kelembagaan ; (3) Program Perencanaan Pembangunan Daerah ; (4) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa ; (5) Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan ; (6) Program pencegahan dan pemberantasan KKN. Sedangkan terdapat 2 (dua) program yang memiliki nilai pencapaian yang sangat rendah yaitu (1) Program Peningkatan Pelayanan Publik ; (2) Program Penataan Tata Laksana Pemerintahan. Hal ini menjadikan pekerjaan rumah bagi perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap program peningkatan pelayanan public dan tata laksana pemerintahan.Hal ini sesuai dengan tujuan nasional yaitu penerapan reformasi birokrasi. Reformasi Birokrasi bertujuan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara. Tujuan Reformasi Birokrasi dalam lima tahun ke depan diharapkan mengarah ke tahapan pemerintahan yang berbasis kinerja, dan pada tahun 2025 diharapkan pemerintahan sudah beranjak pada tatanan *dynamic governance*. Upaya penegakan reformasi birokrasi ini sesuai dengan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Kalimantan Timur dengan nilai indeks reformasi birokrasi 68,93 masuk dalam kategori B (Baik) namun dengan perlu sedikit perbaikan sesuai dengan Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2018. Hal ini bisa terlihat dari nilai capaian program peningkatan pelayanan publik dan penataan tata laksana pemerintahan yang berdasarkan evaluasi RPJMD Tahun pertama masih sangat rendah. Upaya dan pekerjaan rumah harus banyak dilakukan untuk meningkatkan status indeks reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur karena berdasarkan target pada tahun 2021, indeks reformasi birokrasi Kalimantan timur diharapkan mencapai 71,50 yaitu masuk kategori BB (sangat baik).

**Faktor pendorong dan penghambat** terhadap pencapaian pada misi 5 adalah

| **Faktor** | |
| --- | --- |
| **Pendorong** | **Penghambat** |
| Faktor internal pendorong capaian kinerja pembangunan misi 5 meliputi:   1. Ketepatan dalam penentuan program, kegiatan serta indikatornya. Pada prinsipnya hampir seluruh program, kegiatan dan indikator pada misi 5 memiliki korelasi dengan ketercapaian sasaran tujuan dan misi pembangunan. Dalam satu perhitungan, diketahui bahwa ketepatan dalam mementukan suatu perhitungan pada akhirnya akan mendorong ketercapaian dari suatu tujuan yang hendak dicapai sepanjang program dan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan baik. 2. Ketersedian dana. Anggaran yang mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan membuat tidak ada alasan bagi OPD terkait untuk merealisasikan capaian kinerja pembangunan misi 5. Hal ini membuat ketersediaan dana menjadi faktor pendorong capaian kinerja pembangunan misi 5. 3. Sumber Daya Manusia profesional yang tersedia di setiap perangkat daerah terkait; dan 4. Struktur organisasi yang proporsional di setiap perangkat daerah terkait sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan   Faktor eksternal pendorong capaian kinerja pembangunan misi 5 meliputi:   1. Kesedian instrumen-instrumen hukum yang mengikat untuk mewujudkan kinerja pembangunan. Diantara instrumen hukum sebagaimana dimaksud yakni:    1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.    2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.    3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;    4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.    5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.    6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.    7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.    8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.    9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi.    10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).    11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 2. Partisipasi publik (masyarakat). Bagaimanapun, keterlibatan publik tidak dapat dikesampingkan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Tidak sedikit kini instrumen hukum yang memberi ruang bagi publik (masyarakat) untuk berpartisipasi dan menjadi bagian dari keberhasilan kerja-kerja pemerintah, baik dilevel pusat maupun daerah. Hal inilah yang seyogyanya harus disikapi secara bijak untuk kemudian mampu dikonversi sebagai faktor pendorong yang bersifat eksternal untuk mencapai kinerja pembangunan misi 5. | Faktor penghambat sasaran 26 :   * 1. Sistem Evaluasi Intern Perangkat Daerah Belum Berjalan.   2. Sebagian Besar Perangkat Daerah Belum menyusun Cascading Kinerja.   3. Indikator Program dan Kegiatan belum inline dengan sasaran Renstra/ RPJMD   4. Masih dilakukan asistensi dan Evaluasi terhadap perangkat daerah.   5. Program perencanaan daerah belum diselaraskan dengan program perencanaan berbasis Geospasial berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 dan Permendagri No.90 Tahun 2019   6. Perangkat Daerah masih menerapkan perencanaan berbasis “rutinitas” sehingga orientasi untuk program pembangunan dan peningkatan ekonomi belum terlihat sangat jelas |
| Faktor penghambat sasaran 27 :   * 1. Masih cukup banyak SOP perangkat daerah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak dijabarkan secara komprehensif apa yang menjadi penghambat kenapa masih cukup banyak SOP perangkat daerah tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.   2. Belum tersosialisasi dokumen pelayanan public yang ada di setiap perangkat daerah   3. Setiap perangkat daerah mengadakan server dan membangun data center sendiri.   4. Belum tersedianya perangkat lunak untuk MOD ini yang tidak dikembangkan lagi.   5. Beberapa perangkat daerah melakukan Hosting lokasi yang berbeda-beda tidak dalam 1(satu) data center.   6. Target untuk interkoneksi melebihi realisasi dapat terwujud dengan anggaran pemerintahan yang memadai.   7. Sistem Informasi di setiap perangkat daerah yang berbeda membutuhkan web service/API.   8. Terdapat 2 kab/kota yang belum dapat menghadiri pelaksanaan asesmen penilaian.   9. Pada fase pembuatan, kendala yang dihadapi adalah kurangnya SDM yang menguasai teknologi *framework*, bisnis proses yang belum matang, koordinasi dengan *stakeholder* mengenai penggunaan aplikasi. Pada fase pengembangan kendala yang dihadapi adalah ketidaksesuaian bahasa pemrograman dari aplikasi sebelumnya dan perlu dilakukan normalisasi terhadapa basis data aplikasi.   10. Masih terdapat instansi pemerintah yang menggunakan subdomain diluar subdomain kaltimprov.go.id. |
| Faktor penghambat sasaran 28:   1. Dari hasil penilaian oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur untuk disampaikan hasilnya ke BPKP Pusat, yang menjadi permasalahan dalam menuju Level 3 adalah dari 5 unsur penilaian ada 3 unsur masih dalam level 2. Ketiga unsur tersebut 1) Peran Layanan, yaitu Audit Kinerja dan Jasa Konsultasi. 2) Pengelolaan SDM, yaitu Koodinasi SDM, Pegawai Yang Profesional dan Membangun Tim dan Kompetensinya. 3) Praktek Profesional, yaitu: Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko dan KerangkaKerja Manajemen Kualitas. 2. Belum terintegrasinya dalam satu sistem informasi proses pengawasan internal antara Inspektorat, PPNS dan Pimpinan Pemerintah (Gubernur dan Wakil Gubernur) sebagai satu kesatuan pengawasan pegawai provinsi |

**Rekomendasi tindak lanjut terhadap pencapaian Misi 5** adalah

**Secara umum:**

1. Diperlukan kehati-hatian dalam menentukan indikator dari program yang dilaksanakan. Sebisa mungkin indikator harus memperhatikan aspek formil dan substansi. Sebagai contoh indikator program perencanaan pembangunan daerah. Kedepan indikator yang digunakan juga harus menyentuh pada aspek ketepatan pemilihan program dan kegiatan dengan sasaran, tujuan serta misi, tidak hanya berkutat pada apakah program dan kegiatan tersebut telah terlaksana atau tidak.
2. Dibutuhkan sistem pengelolaan perencanaan agar program yang dikerjakan oleh aparatur sipil negara dapat berjalan secara efektif dan efesien.
3. Perlunya penguatan manajemen pengelolaan dan pemahaman perencanaan berbasis pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi bukan sekedar pengerjaan rutinitas untuk mendukung program kinerja perangkat daerah

**Upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien:**

1. Dimensi kelembagaan adalah satu dimensi yang penting dalam mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien. Dimensi ini meliputi penataan kewenangan dan penataan kelembagaan pemerintah sesuai dengan kebutuhan, pengaturan kebijakan kemitraan antara pemerintah dan swasta (*public-private-society partnership*), serta pengaturan kelembagaan yang lentur dan dinamik sebagai upaya mengurangi rigiditas birokrasi yang dapat dilakukan dengan debirokratitasi maupun deregulasi.
2. Diperlukan penguatan pemahaman aparatur sipil negara terhadap program perencanaan di perangkat daerah dalam mendukung program pembangunan daerah sesuai dengan pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi
3. Dibutuhkan program bimbingan teknis dan atau workshop terhadap bidang perencanaan berbasis geospasial, geoekonomi, geososiokultur dan geostrategi terutama kesesuaian dalam pencapaian program prioritas RPJMD.
4. Dibutuhkan peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelengaraan birokrasi.
5. Dibutuhkan peningkatan kualitas kebijakan publik.
6. Dibutuhkan penataan proses penyelenggaraan pemerintahan yang lebih sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis *e-government*.
7. Dibutuhkan penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif dan berbasis merit.
8. Dibutuhkan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, terpadu dan berbasis teknologi informasi.
9. Perlu diprogramkan kegiatan asistensi sistem AKIP bagi perangkat daerah untuk meningkatkan nilai SAKIP.

**Upaya mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas:**

1. Diperlukan fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh OPD terkait.
2. Perlu diprogramkan kegiatan untuk melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam penyusunan SOP bagi perangkat daerah.
3. Diperlukan adanya program penguatan pemahaman perencanaan berbasis pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi sistem perencanaan yang berbasis integrasi perangkat daerah penanggung jawab sektor.
4. Perlu integrasi data dan informasi publik untuk memudahkan masyarakat dalam menerima informasi.
5. Dalam hal ketatalaksanaan, diperlukan implementasi UU administrasi pemerintahan, pengembangan *e-goverment* secara terintegrasi, proses bisnis lokal yang sederhana, cepat dan terintegrasi, peningkatan kualitas *e-procuremntemnt*, manajemen kearsipan birokrasi berbasis teknologi informasi.
6. Dalam hal pelayanan publik, diperlukan modernisasi sistem dan manajemen pelayanan publik (Sumber Daya Masyarakat (SDM), *Information Communication Technologi* (ICT) dan Standar Pelayanan); monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik, membuka ruang partisipasi publik melalui *coaching clinic*; penguatan integritas dalam pelayanan publik)
7. OPD terkait harus melakukan evaluasi dan perbaikan sistem administrasi pada unit layanan publik dengan menciptakan mekanisme yang dapat memastikan bahwa seluruh perangkat baik berupa SOP/sistem/aturan maupun fasilitas yang telah ada dijalankan oleh petugas layanan dan dimanfaatkan oleh pengguna layanan. SOP/sistem/aturan mengenai prosedur, waktu dan biaya harus diketahui/diumumkan kepada pengguna layanan sehingga mempermudah pengguna layanan saat mengurus layanan.
8. Perlu disediakan perangkat informasi yang dapat mudah diakses pengguna layanan dan diperlukan sosialisasi tentang tatacara penggunaan perangkat tersebut.
9. OPD terkait perlu menciptakan mekanisme yang dapat memastikan bahwa seluruh perangkat baik itu berupa SOP/sistem/aturan dijalankan oleh petugas layanan. Hal ini dimaksudkan agar pengguna layanan dapat merasakan keadilan dalam pengurusan layanan sehingga inisiatif memberi/ meminta uang tambahan baik oleh pengguna atau petugas layanan dapat diminimalisi.
10. Diperlukan program untuk memastikan standar layanan yang telah ditetapkan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
11. Diperlukan penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, melalui:
    * Implementasi UU pelayanan Publik;
    * Pemanfaatan *Information Communication Technologi (ICT);*
    * Integritas dan kualitas SDM pelayanan;
    * Budaya pelayanan;
    * Program percepatan (*Quick wins*).
12. Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik, melalui:
    * Penguatan monev kinerja;
    * Efektifitas pengawasan;
    * Sistem pengaduan;
    * Penerapan *reward* and *punishment*.

**Upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel:**

1. Membuat Pedoman Audit Kinerja dan Melakukan Audit Kinerja dan melakukan Pemberian Jasa Advis/Konsultasi kepada OPD.
2. Diperlukan pembentukan zona integrasi di perangkat daerah sebagai bagian dari birokrasi yang berkomitmen terhadap pelaksanaan tugas yang bersih dan bebas KKN.
3. Diperlukan pembentukan Wilayah Bebas Korupsi pada perangkat daerah yang berorientasi terhadap pelayanan public.
4. Diperlukan pembangunan dan pengelolaan SDM secara terencana yang dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas/ kompetensi SDM Aparatur Pengawasan melalui Diklat/Bimtek dan Workshop. Roadmap pembangunan dan pengelolaan SDM sebagaimana dimaksud setidaknya dapat dilakukan melalui tahapan pengembangan sistem manajemen aparatur yang berbasis kompetensi; penerapan *reward and punishment* untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional dan berorientasi pada pelayanan publik, hingga pada akhirnya terujudlah SDM yang profesional.
5. Perlunya penguatan pemahaman manajemen pperencanaan dan pengelolaan berbasis pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi bukan sekedar pengerjaan rutinitas untuk mendukung program kinerja perangkat daerah
6. Diperlukan Program Kerja Pengawasan/Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko sesuai dengan Kerangka Kerja Manajemen yang Kualitas.
7. Dibutuhkan suatu program yang dapat mengembangkan sistem akuntabilitas, pengawasan dan pengendalian secara terintegrasi.
8. Diperlukan program untuk memastikan masyarakat mengetahui besaran biaya resmi/sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam setiap pelayanan.
9. Perlu menyediakan fasilitas/media pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat pengguna layanan (baik melalui kotak pengaduan, sms pengaduan, saluran (hotline) pengaduan, email dan sebagainya). Pengaduan tersebut harus ditindaklanjuti/ ditanggapi oleh petugas.
10. Lebih lanjut, pemerintah daerah perlu menyediakan Unit Pengaduan Pelayanan Publik (UP3) dan mengintegrasikannya ke dalam Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) sebagai upaya meningkatkan partisipasi publik

Peningkatan nilai capaian kinerja program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023 perlu dilakukan berdasarkan kondisi aktual sumberdaya dan potensi peningkatan produktivitas sumberdaya agar mewujudkan Kalimantan Timur Berdaulat yang menjadi tujuan Pemerintah Provinsi dapat tercapai. Berbagai kebijakan yang berkaitan dengan program pembangunan tersebut seyogyanya memiliki relevansi dan kelayakan dalam mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan wilayah menuju masyarakat sejahtera. Penentuan program kerja yang dilaksanakan perangkat daerah harus berdasarkan pada kondisi eksisting, yang diukur dengan aspek geospasial dan geoekonomi.

Usulan kebijakanuntuk meningkatkan pencapaian visi dan misi pemerintah provinsi Kalimantan Timur yang tertuang pada program prioritas RPJMD 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Perlunya regulasi di daerah untuk melakukan “audit produksi kawasan sumberdaya alam”, pengawasan dan pengendalian produksi dan produktifitas hasil-hasil sumberdaya alam di Kalimantan Timur
2. Evaluasi terhadap RPJMD 2018-2023 yang disesuaikan dengan perencanaan pembangunan nasional yaitu RPJMN 2019 - 2024 agar terdapat sinkronisasi program pemerintah pusat dengan program pemerintah daerah.
3. Review terhadap Penataan Ruang Wilayah Provinsi untuk melakukan verifikasi dan sinkronisasi kemampuan kawasan.
4. Perlunya penguatan pemahaman terhadap aparatur perangkat daerah terhadap manajemen perencanaan dan pengelolaan berbasis pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi bukan sekedar pengerjaan rutinitas untuk mendukung program kinerja perangkat daerah
5. Peningkatan kinerja perangkat daerah pada sektor-sektor strategis untuk meningkatkan pencapaian pembangunan daerah dan membentuk system pemerintahan yang beorientasi terhadap pelayanan publik.
6. Membangun sistem koordinasi yang intensif antara perangkat daerah dalam mengembangkan *clear and good governace system* sehingga tujuan pemerintah provinsi dapat tercapai dengan dukungan aparaturnya